

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 9, Nomor 2, April 2015

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting : Muryanti, MA
Sekretaris Penyunting : Puspo Reni Rahayu, S.Sos
Penyunting Pelaksana : Sulistyaningsih, M.Si,
Ahmad Zainal Arifin, P.Hd, Dr. Yayan Suryana,
Sekretariat : Beng Pramono, Arifiartiningih
Desain Sampul & Tata Letak : Kirman
Diterbitkan oleh : Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi : Laboratorium Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta
Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571
Email: sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan
sosiologirefleksif@gmail.com

Sosiologi Reflektif adalah jurnal yang dikelola oleh Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Media ini menekankan kajian seputar persoalan-persoalan sosial. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial baik yang bersifat teoritis, kritik, reflektif, opini, dan berbagai ide-ide dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 20 halaman kuarto, spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), catatan kaki, dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap bersama asal universitas atau lembaga profesional, alamat lengkap dan alamat email, nomor telepon, dan beberapa kalimat biografi penulis.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

Transmitting Charisma: Re-Reading Weber Through The Traditional Islamic Leader in Modern Java <i>Achmad Zainal Arifin</i>	1
Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS <i>Henri Puteranto</i>	31
Respon Masyarakat Desa Sitimulyo terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta <i>Sulistyaningsih</i>	49
Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo <i>Suliadi</i>	79
Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-DI Yogyakarta <i>Nurhadi</i>	103
Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008 <i>Sri Roviana</i>	119
Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini <i>Rahmat Edi Irawan</i>	139
Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor <i>Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, dan Funny Mustikasari</i>	155

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif <i>Dudung Abdurahman.</i>	175
Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas Cerpen Pilihan Kompas dan Cerpen Kompas Pilihan <i>Adib Sofia.</i>	191
Pendidikan Damai: Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan <i>Muh. Syamsuddin.</i>	213
Islam dan Pekerjaan Sosial <i>Zulkipli Lessy.</i>	235
Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif <i>Achmad Maulani.</i>	253
Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding Atas Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawé) dan JLFR (Jogja Last Friday Ride) di Kota Yogyakarta <i>Mohamad Jamal Thorik.</i>	281
Dibalik Kekuatan Ideologi dan Kepentingan <i>Hendris.</i>	309

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr.wb.

Dinamika permasalahan umat Islam teramat luas dan menarik untuk dikaji, terkait dengan kelembagaan Islam yang masih eksis selama ini. Peran berbagai macam lembaga tersebut nampak dari upaya yang dilakukannya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial yang muncul saat ini, misalnya adanya permasalahan AIDS, kepemimpinan dalam konteks kekinian, isu kekerasan yang muncul dalam sistem pendidikan dan lainnya. Permasalahan tersebut akan dibahas di beberapa artikel Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 9 Nomor 2, April 2015.

Achmad Zainal Arifin menulis tentang *Transmitting Charisma: Re-reading Weber through the Traditional Islamic Leader in Modern Java*. Artikel ini mencoba untuk menelaah kembali pandangan seorang tokoh klasik sosiologi, Max Weber, berkenaan dengan teori kepemimpinan beliau, lebih khusus lagi pandangan tentang karisma. Dalam hal ini, Weber berpandangan bahwa proses modernisasi, khususnya proses rasionalisasi yang tidak lagi bisa dibendung pengaruhnya, akan menyebabkan otoritas kharismatik akan berubah, terutama ke arah model legal-rasional. Keyakinan bahwa kualitas kharismatis, yang biasanya direpresentasikan oleh kekuatan supranatural, yang dalam pandangan Weber akan tererosi oleh proses modernisasi, justru semakin terinstitusionalisasi dalam dunia pesantren dan bahkan diyakini bisa ditransmisikan melalui institusi-institusi yang ada.

Henri Puteranto menganalisis tentang Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS. Penulis menjelaskan problematika pengelolaan program HIV/AIDS muncul ketika suatu organisasi sosial keagamaan menjalankan program ini. Organisasi keagamaan dituntut untuk mampu menjalankan program secara efektif. Namun demikian, dalam

implementasinya akan berhadapan dengan “*body of knowledge*” dari program HIV/AIDS. Menurutnya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mampu menjawab isu-isu sensitif di program HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, membangun legitimasi organisasi dan mengelola manajemen pengetahuan secara efektif.

Artikel Respon Masyarakat Desa Sitimulyo Terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta ditulis oleh Sulistyaningsih. Penulis menjelaskan bahwa persoalan sampah, terutama persoalan sampah rumah tangga merupakan persoalan penting yang harus segera disikapi secara bijak. Selama ini pengelolaan sampah rumah dilakukan dengan *system sanitary landfill* yaitu sampah harus diolah, dipadatkan dan ditimbun setiap hari. Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, Pengelolaan TPA Piyungan yang berlokasi di Desa Sitimulyo sejak tahun 1995 sampai sekarang telah menimbulkan respon yang bervariasi dari masyarakat Desa Sitimulyo. Ada masyarakat yang merespon pro (setuju) terhadap pengelolaan TPA tersebut, namun ada juga yang kontra (tidak setuju) terhadap TPA. Perbedaan respon yang ada disebabkan karena ada masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan adanya TPA di Desa Sitimulyo. *Kedua*, Kebijakan pemerintah Desa Sitimulyo terhadap pengelolaan TPA di Desa Sitimulyo lebih mengikuti aspirasi masyarakat.

Suliadi menulis Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo. Tulisan ini menjelaskan perubahan sikap politik petani dalam menanggapi ekspansi kapitalisme pertambangan tidak lebih sebagai kompromi politik petani dalam merespon ekspansi tersebut. Menurutnya apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah cara-cara yang ditempuh para pemodal/perusahaan dan negara dalam melakukan ekspansi yang bias kapitalis yang hanya menciptakan masyarakat petani menjadi tersingkir terhadap akses sumber daya yang ada.

Nurhadi menulis artikel tentang Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-Di Yogyakarta. Faktanya, terdapat perbedaan daya tahan menyebabkan adanya perbedaan dampak bagi setiap rumah tangga yang mengalami bencana. Dampak bencana di daerah rawan bencana Bantul dapat dikategorikan sebagai berikut : (1) orang yang paling kaya menderita

paling sedikit bencana karena kemampuannya mengurangi dampak bencana dengan memperkuat rumahnya dan menggunakan asset yang dimilikinya, (2) penderitaan yang dialami, menjadikan orang miskin mampu mengurangi dampak dari kejadian bencana di masa depan untuk keberlangsungan hidupnya dengan memaksimalkan modal social sehingga meminimalkan biaya untuk membangun rumah dan (3) kelompok bertahan hidup yang paling rentan terhadap peristiwa bencana karena kekayaannya sudah habis untuk biaya rekonstruksi dan ketidakmampuannya mengurangi biaya buruh.

Sri Roviana menguraikan tentang proses Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008. Penulis mejelkaskan bahwa perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbagai macam organisasi perempuan menyadari pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, salah satunya organisasi KPI. Penulis menyimpulkan terhadap program yang dijalankan oleh KPI selama ini menunjukkan bahwa KPI Yogyakarta merupakan embrio dari gerakan sosial baru, akan tetapi pertumbuhan gerakan ini perlu menyingkirkan kelemahan yang muncul di tengah jalan: kesulitan membangun ideologi bersama, representasi politik yang ditunjukkan oleh organisasi elit, tidak adanya konsolidasi yang berbasiskan organisasi, ketergantungan kepada donor dan ketidakmandirian dan pembiayaan sukarela untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan.

Rahmat Edi Irawan menulis artikel tentang Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini. Menurutnya saat ini mulai terjadinya pergeseran penonton pasif ke penonton aktif di industri televisi Indonesia. Jika pada masa lalu, banyaknya hambatan, seperti rezim pemerintahan yang represif, tidak adanya pilihan program dan stasiun televisi serta belum adanya regulasi dan regulator menyebabkan lamanya penonton televisi di Indonesia bersikap pasif. Sementara saat ini, pemberdayaan penonton melalui berbagai media dan upaya yang dilakukan KPI menyebabkan kondisinya sudah berubah, penonton mulai aktif bersikap. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatkan sikap kritis mereka, dengan banyaknya melakukan pengaduan atas tayangan yang melanggar regulasi baik melalui KPI atau media massa lainnya.

Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, Dan Funny Mustikasari menganalisis tentang Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi organisasi berpengaruh pada efektivitas

organisasi, salah satunya terkait kinerja. Terpenuhinya kebutuhan informasi dan komunikasi di dalam organisasi menimbulkan kepuasan komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja dari karyawan, dalam tulisan ini adalah pendidik di IPDN Jatinangor. Ketika interaksi sosial yang meliputi kontak sosial dan komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik, maka hubungan antar anggota organisasi terkait dengan pekerjaan akan berjalan dengan baik, dan kinerja para anggota organisasi dapat meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif ditulis oleh Dudung Abdurahman. Penulis menjelaskan Kaum Sufi merupakan realitas sosial yang berbasiskan keagamaan pada komunitas-komunitas tarekat. Tarekat sendiri adalah salah satu bentuk implementasi keislaman yang bercorak esoterik, yang secara sosiologis biasa menampilkan aktivitasnya yang terstruktur dalam kelompok guru dan murid. Hubungan antara keduanya terjalin dalam sistem sosial yang konsisten terhadap moralitas dan spiritualitas masyarakat. Karena itu dinamika sosial Kaum Sufi dalam gerakan-gerakan tarekat itu selalu bercirikan : *pertama*, pengembangan doktrin sufi melalui sistem ritual berfungsi memperkuat solidaritas sosial para penganut tarekat. *Kedua*, peranan Kaum Sufi dalam bentuk hubungan dan partisipasi sosial di tengah kemajemukan masyarakat pada umumnya menampilkan model gerakan sosial yang unik, khususnya sumbangan mereka terhadap pembinaan spiritual dan moralitas publik di tengah-tengah perubahan sosial. *Ketiga*, tipologi gerakan sosial Kaum Sufi pada umumnya bersifat *inklusifme-pragmatis; eksklusifme-fundamentalis; dan fundamentalisme-pragmatis*.

Adib Sofia menulis artikel yang berjudul Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas *Cerpen Pilihan Kompas* dan *Cerpen Kompas Pilihan*. Hegemoni merupakan konsep yang dikenalkan Gramsci untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik politik, budaya dan ideologi. Pendekatan mendasarnya adanya hubungan yang kompleks dan non mekanik antara budaya dan politik. Gramsci mempertanyakan bentuk kebudayaan manakah yang menjadi budaya massa yang diproduksi kontemporer. *Cerpen Kompas Pilihan* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) dan *Cerpen Pilihan Kompas* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) merupakan kumpulan cerita pendek terbaik yang dimuat di harian *Kompas*, salah satu penerbit terkemuka. Mereka mempublikasikan secara periodik sejak tahun 1970 dan menjadi salah satu produk dari masyarakat.

Muh. Syamsuddin menjelaskan tentang Pendidikan Damai:

sebagai Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan. Penulis menegaskan bahwa kekerasan merupakan bentuk hegemonik dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Termasuk dalam pendidikan dilakukan melalui proses dehumanisasi dari substansi dan metode pembelajaran. Metode pengajaran yang berlangsung selama ini dilakukan dengan pendekatan pedagogi atau seorang guru, menjadi figur yang sempurna (mengetahui tentang banyak hal) dan siswa hanyalah obyek. Tindakan ini disebut kekerasan pendidikan. Kekerasan ini dapat merusak kepribadian.

Islam dan Pekerjaan Sosial dianalisis oleh Zulkipli Lessy. Menurut Teologi Islam dan lima pilar Islam memiliki sejarah dan peran penting dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial dan masyarakat Muslim. Beberapa efeknya dikaji dengan menggunakan review literatur dan melalui komparasi diantara masyarakat Muslim dan beberapa kelompok agama yang mengikutinya serta menguji teologi Muslim Shi'i dan Muslim Sunni. Konsep utama dari Islam, misalnya : syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji seharusnya dijalankan oleh pekerja sosial Muslim dalam praktiknya dalam masyarakat Muslim.

Achmad Maulani menulis tentang Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif. Penulis menegaskan Pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) dipahami sebagai pelopor utama Islam di Indonesia. Bukan hanya karena kelembagaan tradisionalnya sebagai rujukan dalam Islam, akan tetapi karena pengembangan pendidikan Islam yang menonjol serta pengembangan wacana keislaman. Perkembangannya akhir-akhir ini, kedua lembaga tersebut berkontribusi penting dalam membangun dialog antara nilai islam dan budaya lokal.

Artikel terakhir dalam kajian jurnal ini ditulis oleh Mohamad Jamal Thorik dalam tugas akhirnya yang berjudul Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding atas Sego Segawe (*Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe*) dan JLFR (*Jogja Last Friday Ride*) di Kota Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan perbedaan antara Sego Segawe dan JLFR pada pola sosialisasi yang dibagi menjadi 5 mekanisme sosialisasi : 1) imitasi: Sego Segawe menggunakan keteladanan Walikota dan Pegawai Balaikota, sedangkan JLFR menggunakan keteladanan komunitas sepeda; 2) instruksi: Sego Segawe menggunakan Surat Edaran (SE) sebagai himbauan bersepeda, namun aspek instruksi tidak terdapat pada JLFR; 3) desiminasi: Sego Segawe kurang memaksimalkan sarana komunikasi, sementara JLFR menggunakan sarana *social media* dengan

intens; 4) motivasi: Sego Segawe menunjukkan dukungan melalui *reward* kepada pelajar sebagai duta sepeda, sedangkan JLFR menggalang dana untuk pesepeda korban kecelakaan; 5) penataran, Sego Segawe mengalami inkonsistensi pada pelaksanaan kampanye secara parsial, sedangkan JLFR melaksanakan kampanye secara rutin.

Demikian gambaran secara umum jurnal yang akan sidang pembaca nikmati edisi ini. Semoga apa yang tertuang dalam kajian ini memberikan sumbangan yang berarti dan menjadi sumber pengetahuan baru. Selamat membaca. *Wallahu a'lam bi shawab.*

Wassalamualaikum wr. wb

Redaksi

PENDIDIKAN POLITIK KOALISI PEREMPUAN YOGYAKARTA WILAYAH YOGYAKARTA 2000-2008

Sri Roviana

Direktur LSM Mitra Wacana Yogyakarta

Alamat Email : -

Abstract

Indonesian women are marginalized in political decision making. Various of women organizations before independence considered that political education to women as an important step. The Coalition of Women's programs focus on political education. The method used in this research is descriptive, explorative, exploratory for illustrated with clear linkages between issues. Data mining is done by in-depth interviews as the primary data and the study of literature as secondary data. The data were analyzed by the social movement theory. The result of this research namely : First, political education into the long-term effort to equip women to have a political vision in the lives of individuals, groups or state. Second, the Coalition of Women's Yogyakarta region because of ideology and values held by diverse, have run into trouble when mobilization in the field. Women's Coalition Yogyakarta region as a mass movement, depending on the actors and major donors. Third, the Coalition of Women in the Yogyakarta area represents the activity is more elite and educated class, represented by its management, not a representation of the existing member base in the hamlets with the appearance of weak economic class and low education. Fourth, because the mass relations of women with a donor agency that is so close, without realizing the long term has made a run when there is mass movement of funds from donors, and shuffle away when the donor agency. The summary of research namely: Indonesian Women's Coalition Yogyakarta region actually has qualified as an embryo or a sprinkling of new social movements, but the growth of this movement must deal Weakness factors are present in the middle of the road: difficulty building shared ideology, political representation, which represented the elite organization, no consolidation organizing base, dependence on donor funding agencies

and lack of self-help and self-financing members to conduct political education of women.

Key Words: Woman, Politics Education, Movement Issu and Social Movement

Intisari

Perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbagai macam organisasi perempuan menyadari pentingnya pendidikan politik bagi perempuan. Program yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia fokus pada pendidikan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan deskriptif, eksplorasi dan penjelasan eksplorasi untuk menjelaskan hubungan berbagai macam isu. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan kajian literatur sebagai data sekunder. Teori yang digunakan adalah gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan : (1) pendidikan politik merupakan langkah jangka panjang sehingga perempuan memiliki visi politik sebagai individu, kelompok dan warga negara. (2) ideologi dan nilai yang berbeda pada KPI daerah Yogyakarta menyebabkan adanya masalah di lapangan. KPI Yogyakarta sebagai sebuah gerakan tergantung pada aktor dan donor. (3) KPI Yogyakarta menunjukkan aktivitas dari kelas elit dan terdidik yang ditunjukkan dari manajemen, yang tidak menunjukkan aktivitas kelas ekonomi lemah dan pendidikan rendah. (4) hubungan antara perempuan dan donor yang kuat, tanpa adanya kerjasama dalam jangka waktu panjang yang menjadikan ketergantungan gerakan pada dana yang dikeluarkan donor dan berjalan sesuai keinginan donor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI Yogyakarta merupakan embrio dari gerakan sosial baru, akan tetapi pertumbuhan gerakan ini perlu menyingkirkan kelemahan yang muncul di tengah jalan: kesulitan membangun ideologi bersama, representasi politik yang ditunjukkan oleh organisasi elit, tidak adanya konsolidasi yang berbasiskan organisasi, ketergantungan kepada donor dan ketidakmandirian dan pembiayaan sukarela untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan.

Kata Kunci : Perempuan, Pendidikan Politik, Isu Gerakan, dan Gerakan Sosial

Pendahuluan

Pasca 1998 adalah momentum kebangkitan gerakan sipil di Indonesia dari yang radikal ekstrim kanan sampai radikal ekstrim kiri. Gerakan sipil pro demokrasi menemukan momentum bangkit ketika pasca 1997 dengan ditandai perkembangan politik Indonesia yang berlangsung amat cepat. Namun demikian, jatuhnya rezim lama, tidak secara otomatis identik dengan lahirnya demokrasi.

Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi didirikan pada 18 Mei 1997 di Jakarta dalam momentum perlawanan Gerakan Perempuan, Mahasiswa dan Kelompok Pro Demokrasi lainnya terhadap rezim otoriter Pemerintahan Orde Baru. Rezim Orde Baru sudah menghancurkan gerakan perempuan dengan penyeragaman/penunggualan ideologi dan wacana yang merugikan perempuan (seksis) serta pembedaan (diskriminatif) terhadap perempuan.¹

Yogyakarta dinilai sebagai lokasi strategis secara politis bagi diselenggarakannya sejumlah Konggres Perempuan Indonesia.² Karenanya, Konggres Koalisi Perempuan Indonesia yang pertama, dipilih dilakukan di Yogyakarta, pada tanggal 17-22 Desember 1998 dan diikuti oleh sekitar 500 perempuan dari berbagai propinsi di Indonesia. Ormas dan Gerakan Koalisi Perempuan Indonesia lahir pada saat rezim orde baru selama 32 tahun menanamkan nilai Ibuisme pada organisasi perempuan.

Ada dua penyebab utama terkait dengan fokus bahasan studi yakni terkait dengan kondisi eksternal dan internal perempuan yang mengharuskan pilihan politik dilakukan oleh Koalisi Perempuan. *Pertama*, tahun 1997 kondisi politik regional yang berubah ditandai dengan terjadinya gelombang demokratisasi dalam semua arah kehidupan masyarakat termasuk gerakan perempuan. Ada banyak demonstrasi dilakukan oleh kaum perempuan seperti di Vietnam,

1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2005 hlm. 3.

2 Terhitung Konggres Perempuan Indonesia Pra Kemerdekaan yang Pertama dan Kedua senantiasa dilakukan di Yogyakarta. Bahkan Konggres Perempuan kedua, tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta merupakan momentum bagi dicanangkannya 22 Desember sebagai hari Ibu. Hari Ibu yang dimaksud konggres kaum perempuan waktu itu adalah hari Ibu sebagai Ibu masyarakat Indonesia yang militan. Konggres Perempuan Kedua para tahun itu sudah menghasilkan rekomendasi yang politis yakni : menolak imperialisme Belanda, merevisi UU perkawinan produk Belanda, bahkan mendorong perempuan untuk bersama laki laki bersatu dalam diplomasi politik untuk membebaskan Nusantara dari penjajahan Belanda.

Thailand dan Filipina. Di Indonesia pun tidak berbeda, ada gerakan Suara Ibu Peduli, yang mengorganisir kaum perempuan untuk melakukan demonstrasi karena naiknya harga-harga sembako termasuk susu bayi dan anak. *Kedua*, sekalipun perubahan iklim politik terjadi tetapi nasib perempuan tampak sekali belum banyak mengalami perubahan yang signifikan. Perempuan tetap marginal secara politik dan ekonomi. Koalisi Perempuan tampak sekali hendak menjadikan momentum perubahan iklim politik regional dan nasional sebagai titik pijak untuk memberdayakan kaum perempuan dari subordinasi dan kebutaan kejadian politik yang selama ini dialami.

Selama sepuluh tahun perjalanannya, Koalisi Perempuan memilih fokus kerja bidang pemberdayaan dan pendidikan politik kader. Dalam misi selanjutnya Koalisi Perempuan juga melakukan kerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai dari tingkat basis, lokal, nasional, regional, hingga internasional.

Studi ini memfokuskan bahasan pada Koalisi Perempuan wilayah Yogyakarta selaku representasi dari ormas gerakan, yang tumbuh menjelang peristiwa reformasi. Koalisi Perempuan sebagai ormas gerakan tampaknya memiliki karakteristik sebagai gerakan sosial baru karena memiliki hubungan ideologis dengan gerakan perempuan lain di Indonesia. Tulisan di sini bermaksud untuk menjawab mengapa Koalisi Perempuan Wilayah Yogyakarta memilih pendidikan politik sebagai isu utama dan bagaimana pendidikan politik bagi perempuan dilakukan oleh aktor-aktor perempuan wilayah Yogyakarta pada tiap level (basis, kabupaten, provinsi dan nasional) serta capaian strategis dan hambatan apa dalam pendidikan politik sejak tahun 2000 – 2008.

Refleksi teoritis tentang Gerakan Sosial di Koalisi Perempuan Yogyakarta

a. Pendidikan Politik.

Pendidikan politik dalam tulisan ini adalah pendidikan yang bersifat alternatif, berisi tentang penambahan wawasan, ketrampilan, dan sikap agar individu menjadi mampu mengembangkan organisasi di setiap tingkatan, mulai dari masyarakat basis hingga masyarakat internasional. Selain itu pendidikan politik adalah serangkaian aktifitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat agar dapat terlibat sesuai kapasitasnya dalam berbagai bentuk aktifitas politik. Partisipasi politik bisa berbentuk aktif dan pasif, berbeda pada masing

masing jenjang keterlibatan politik.³

b. Gerakan Sosial

Mengacu pada teori gerakan sosial, maka yang dimaksud dengan gerakan sosial dalam tulisan ini adalah aktifitas yang dilakukan secara sistematis, kontinyu (terus menerus) oleh para aktivis (pegiat masyarakat), yang kemudian menjadi kelompok terorganisir, mengusung satu isu tertentu, dan menggunakan metode tertentu sebagai cara menjalankan proses pendidikan politik, pemberdayaan, dan ideologisasi.

Sebuah komunitas bisa dikatakan sebagai gerakan sosial, mengikuti Rajendra Singh, terdiri dari: komunitas yang memiliki isu yang diperjuangkan sebagai ideologi, aktor yang bergerak dalam perjuangan isu, serta komunitas dan jaringan yang terpelihara. Karena itu, Koalisi Perempuan Indonesia hendak dilihat dalam level gerakan.⁴

Teori gerakan sosial mengatakan, bahwa gerakan sosial akan bangkit sebagai respon jika dalam sebuah negara terjadi proses-proses ketidakadilan. Termasuk untuk mampu melihat ideologi, aktor, aktifitas, dan jaringan yang dibangun, maka studi ini akan menggunakan teori gerakan sosial baru.⁵

Sidney Tarrow menyebutkan bahwa gerakan sosial bisa lahir sebagai reaksi adanya kondisi sosial politik yang sakit (*social ills*) atau masyarakat yang gelisah (*social greavances*), sehingga dibutuhkan sebuah gerakan perlawanan.⁶ Charles Tilly juga menyatakan demikian.⁷ *Social greavances* yang terjadi sepanjang tahun 1994 - 1997 itulah yang menjadi penyebab gerakan sosial di Indonesia bangkit.

Hal yang paling fundamental dalam sebuah gerakan, adalah kontinuitas penyebaran ideologi atau ideologisasi. Konsistensi yang dimaksud adalah konsistensi aktifitas dan pilihan fokus isu yang dikerjakan secara berjaringan. Hal ini mengandaikan bahwa sebuah gerakan sosial tidak bisa berdiri sendiri dan berjalan secara gradualistik

3 Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta, 2005 hlm. 122-124 122-124.

4 Rejendra Singh, *Social Movement Old and New Perspective*, Sage Publication, India, 2002 hlm. 102.

5 *Ibid.* Rajendra (2002), mengatakan bahwa gerakan sosial seharusnya memiliki ideologi, aktor, isu, serta jaringan (komunitas).

6 Sidney Tarrow, *Power in Movement*, Cambridge University, United Kingdom, 1994

7 Tilly, Charles, *From Mobilization to Revolution*, Reading, Mass, Madison, USA 1978

dan partikularistik. Disinilah kemudian disebut bahwa gerakan sosial dari sebuah kelompok harus bersinergi dengan gerakan di komunitas lain.

Rajendra Singh mensinyalir bahwa gerakan sosial memiliki beberapa varian, sekurang-kurangnya dalam dua varian besar yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru.⁸ Jika gerakan sosial lama, masyarakat akan bergerak berlandaskan pada isu-isu sektoral, aktornya sangat elit (khusus) dan jaringannya tidak terdistribusi secara menyeluruh maka gerakan sosial baru memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik gerakan sosial baru tersebut sangat menyebar dan lebih menyeluruh.⁹

Dari karakteristik gerakan sosial di atas, hal yang sangat penting dalam gerakan sosial adalah aktor gerakan. Aktor gerakan sosial, seperti saran Rajendra Singh adalah; *pertama* bergerak secara simultan dan menyeluruh antara satu komunitas aktor dengan komunitas lainnya,

8 *Ibid*, hlm. 99-103.

9 *Pertama*, secara ideologis, gerakan sosial baru berupaya memberikan respons yang kritis atas ideologi negara yang menyebabkan munculnya penderitaan-penderitaan pada masyarakat sipil. Oleh sebab itu, ideologi gerakan sosial baru adalah bagaimana menciptakan ideologi masyarakat sipil menjadi kuat untuk menghadapi kekuasaan negara yang telah membuatnya menderita ketidakadilan. Dari sana bila dimungkinkan terjadinya sebuah revolusi sosial karena faktor komodifikasi dan mobilisasi sosial dengan berbasiskan ideologi perlawanan atas penderitaan-penderitaan masyarakat sipil.

Kedua, melebihi-melampaui tradisi Marxian dalam menganalisis perlawanan kelas (buruh-majikan). Dalam melihat struktur ketidakadilan bukan lagi dilandaskan pada adanya pembedaan kelas sosial (buruh-majikan) tetapi lebih mendasarkan pada adanya kekuasaan yang dominan atas masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa terlibat aktif dalam partisipasi politik, akses ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, struktur sosial yang demikian harus dirombak dengan melampaui analisis Marxian menuju Neo-Marxian. Landasan analisisnya adalah penindasan non material, tetapi penguasaan dalam makna yang lebih simbolik dan *powerfull* (kekuasaan).

Ketiga, meminjam Jean Cohen, Singh mengintrodusir bahwa gerakan sosial baru semestinya berpijak pada perlunya sebuah gerakan masyarakat sipil yang lebih responsif atas perlunya komunikasi yang kritis dan identitas kolektif sebagai basis gerakannya. Soal komunikasi yang kritis menjadi basis utama gerakan sosial baru sebab terjadinya perubahan hanya bisa dilakukan ketika masyarakat dapat merespons kebijakan-kebijakan negara yang dinilai tidak adil atas mereka (masyarakat sipil). Selain itu, karena adanya penindasan secara perilaku sosial politik pada akhirnya menyebabkan terjadinya identitas kolektif yang termarginalkan. Disini perlunya memunculkan *collective identity* sebagai basis gerakan sosial.

Keempat, struktur gerakan sosial harus lebih meluas, bukan hanya bersifat formalitas klasikal, yakni hanya membuat struktur organisasi dengan satu misi gerakan. Gerakan sosial baru mengelaborasi isu-isu sosial yang luas, dari masalah gay, gender, lesbian, gerakan keagamaan radikal, ekonomi pasar sampai masalah petani dan buruh. Isu sosial menjadi bagian penting dari tujuan gerakan yang hendak diusung. Oleh sebab itu, struktur gerakan sosial baru memang lebih rumit dan konprehensif tidak lagi dalam format klasik Marxian.

tidak segregatif, *kedua*, aktor gerakan sosial haruslah orang-orang yang otonom, pluralistik, dan berbeda-beda latar belakang sosialnya, mereka tidak mengabaikan masalah egalitarianisme; *ketiga*, aktor gerakan sosial juga harus berusaha memiliki kesadaran kolektif sebagai sebuah gerakan bersama, tidak individualistik dan aktor-aktor gerakan sosial ini memiliki akses pada negara dalam hal ekonomi dan pasar.¹⁰

Memperhatikan apa yang disampaikan Singh di atas, maka sebuah gerakan sosial sebagaimana disarankan oleh teori gerakan sosial lainnya, Donatella della Porta dan Mario Diani, *pertama*, perlu adanya identitas dan aktifitas kolektif. *Collective behaviour* dimaknai sebagai identitas gerakan yang akan menjadikan gerakan sosial memiliki sebuah ciri khas atas apa yang menjadi perhatian dan bagaimana melakukan aktifitas kolektif.¹¹

Identitas dalam gerakan sosial akan muncul karena adanya konstruksi bahwa negara pada kondisi tertentu tidak memberikan ruang pada adanya partisipasi publik. Memang identitas kolektif akan terkesan negatif sebagai sebuah gerakan perlawanan tetapi sangat positif untuk menumbuhkan semangat kolektif dalam masyarakat. Nilai positif lain dari adanya identitas adalah adanya semangat berjejaring dalam isu yang sama dari aktor-aktor yang beragam latar belakang.

Dari identitas kolektif inilah kemudian akan memunculkan hal **kedua**, *collective behaviour*, sebuah perilaku bersama yang sudah terkonstruksikan sebagai sebuah perilaku "perlawanan" atas kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana cita-cita keadilan untuk semua, termasuk keadilan dalam partisipasi politik. Identitas kolektif juga akan memunculkan adanya solidaritas sosial di antara mereka yang termarginalkan. Hal ini memunculkan gerakan yang sifatnya terus menerus.

Mobilisasi isu gender mainstreaming

Isu ini merupakan masalah sangat penting yang diambil oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam mengambil pendidikan politik sebagai sebuah gerakan masyarakat dan embrio gerakan sosial. Sebagai isu, masalah gender mainstreaming merupakan isu yang cukup seksi dikalangan gerakan perempuan dan beberapa LSM yang bergerak dalam isu-isu keadilan gender dan perempuan pada umumnya.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 102

¹¹ Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movements An Introduction*, Blackwell Publisher, USA,1999. hlm. 87-89..

Mobilisasi isu gender mainstreaming dilakukan Koalisi Perempuan Wilayah DIY berdasarkan kebutuhan lokal DIY. Meskipun begitu sebagai organisasi nasional, dalam melakukan aksi pendidikan politik dan advokasi selalu menggunakan kiblat keputusan nasional atas persoalan perempuan. Persoalan perempuan yang diadvokasi Koalisi Perempuan Indonesia pada anggotanya terutama merupakan persoalan praktis dan strategis perempuan yang dikategorikan menurut kelompok kepentingan.

Koalisi Perempuan turut menyuarakan pelebagaan *gender mainstreaming*, salah satunya melalui keterlibatan para aktor yang diangkat sebagai konsultan pemerintah. Dengan masuknya team dari Koalisi Perempuan, akademisi dan LSM di DIY. Hasilnya, pada tahun 2006, Kota Yogyakarta menerima penghargaan *Gender Award* dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagai salah satu Kabupaten/Kotayang mensukseskan dilakukannya *mainstreaming gender* dalam program pemerintah. Program *mainstreaming gender* di kota Yogyakarta berfokus pelayanan kepada kelompok miskin, kelompok korban kekerasan, kelompok lansia dan penyandang cacat.

Keberhasilan advokasi bidang *gender mainstreaming* tampaknya lebih karena dilakukan dengan kerja berjejaring, meskipun pegiat Koalisi Perempuan sudah terlebih dahulu mendapatkan pendidikan *gender mainstreaming*. Jejaring dengan pihak pemerintah dan LMS lain di DIY yang memiliki perhatian pada masalah *gender mainstreaming*.

Partisipasi Politik dan Pelebagaan Politik

Persoalan partisipasi politik dan pelebagaan/pengembangan politik di Koalisi perempuan merupakan isu yang penting, namun masih mengalami kendala yang agak serius. Dalam konteks partisipasi politik dalam maknanya mendorong perempuan-perempuan untuk dapat melekat politik, tampaknya telah dilakukan dengan pelbagai aktifitas pendidikan politik, melalui seminar, sarasehan, workshop dan desiminasi melalui buku-buku terbitan Koalisi Perempuan, maupun pamflet-pamflet. Namun, partisipasinya sebagian masih terbatas pada partisipasi pasif, bukan partisipasi aktif. Partisipasi pasif yang dimaksud adalah adanya perhatian pada proses politik yang sedang berlangsung di Indonesia, baik tingkat daerah (Pilkada) maupun Pilihan legislatif dan Pilihan presiden .

Sementara pelebagaan politik yang dimaksudkan di sini adalah adanya dorongan bagaimana aktivis Koalisi Perempuan dapat secara

nyata menjadi bagian dari partai politik, pejabat daerah atau nasional karena rekomendasi dari Koalisi Perempuan Indonesia. Pada tahapan mendorong aktivis atau pegiat Koalisi Perempuan Indonesia masuk partai politik atau menjadi pejabat publik telah dilakukan, tetapi memastikan agar pegiat dan aktivis Koalisi Perempuan Indonesia masuk di pemerintahan dan partai masih belum terlaksana dengan baik. Pelembagaan politiknnya masih bersifat himbauan-himbauan.

Belum ada pelembagaan politik secara terstruktur untuk memastikan kader kader potensialnya duduk di lini pengambilan keputusan. Proses pelembagaan politik ini selalu diawali dari kapasitas personal yang baik mau dan mampu. Beberapa posisi yang memang dibuka untuk masyarakat sipil yang kapabel adalah : posisi di KPU, posisi Panwaslu, posisi sebagai calon DPD, sebagai calon anggota Ombudsman Daerah, Ombudsman Swasta, sebagai Pemantau dan Panitia Pemilu Desa (KPPS), sebagai konsultan pemerintah, sebagai tim pengarusutamaan gender tingkat propinsi dan kabupaten/kota, sebagai lurah, calon bupati/wakil bupati, atau lainnya.

Pada tahun 2003, Sekjen menulis tentang strategi pokok untuk meningkatkan partisipasi dan representasi (keterwakilan) perempuan :

- a. Menetapkan target paling sedikit 30% perempuan di kursi pengambilan keputusan.
- b. Memastikan kebijakan *affirmatif action* diakomodir UU, dan dapat diterapkan.
- c. Koalisi Perempuan memberikan dukungan penuh bagi kandidat perempuan agar mereka dapat tampil secara meyakinkan dan memberikan dukungan penuh ketika mereka telah menjadi legislator dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan bagi tugas tugas mereka.
- d. Melakukan pendidikan politik untuk pemilih, memastikan janji janji politik mereka terpenuhi ketika sudah duduk di dewan.
- e. Memastikan bahwa anggota parlemen dapat berpartisipasi dalam melakukan reformasi semua kebijakan dan peraturan perundangan yang diskriminatif dan tidak berperspektif gender.
- d. Membentuk kaukus perempuan sebagai sarana lobby untuk memastikan bahwa perspektif perempuan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang akan diambil.¹²
- e. Memperhatikan langkah strategis yang diambil Koalisi Perempuan

¹² Disarikan dari makalah tentang "UU Pemilu dan Peluang Politik Perempuan, Nursyahbani Katja Sungkana. Semai, Edisi 8 Agustus 2003.

Indonesia dalam melakukan pendidikan politik dalam bidang partisipasi politik sebenarnya telah terbuka jalan bagaimana proses politik yang adil, memperhatikan keadilan gender.

***Affirmative Action*, Kuota 30% Parlemen Perempuan**

Koalisi Perempuan merupakan salah satu organisasi gerakan yang paling depan menyuarakan kuota 30% untuk perempuan. Pada tahun 2004 terdapat pembagian peran yang sangat baik. Koalisi Tingkat Nasional bertugas mengadvokasi persoalan ini di tingkat nasional hingga UU Pemilu tahun 2004 disahkan. Pasal 65 ayat (1), memuat *affirmatif action* bagi perempuan sekalipun menuai pro kontra, setahap perjuangan telah berhasil. Keberhasilan melakukan lobby pada pasal ini dilakukan secara khusus oleh tim lobby Koalisi Perempuan pada tingkat Nasional dan berdampak pada level lokal (daerah) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penetapan calon anggota legislatif dan pengurus partai politik.

Koalisi Perempuan Wilayah Yogyakarta melakukan konsultasi kepada panitia seleksi KPUD tingkat propinsi atau kabupaten, agar ada keterwakilan perempuan dalam KPUD propinsi dan kabupaten kota. Koalisi Perempuan telah menyiapkan kadernya yang mampu dan mau untuk mendaftarkan diri. Hingga hasilnya pada tahun itu, terdapat 2 perempuan sebagai anggota KPU Propinsi DIY, 1 anggota sebagai KPU Sleman, 1 anggota sebagai KPU Kulon Progo. Koalisi Perempuan juga melakukan hearing, konsultasi soal *affirmatif action* kepada 6 partai besar di DIY, untuk memastikan sikap partai pada proses pencalegan.¹³

Kebijakan Pembangunan Sensitif Gender

Kebijakan pembangunan sensitif gender adalah kebijakan yang lahir dengan memasukkan unsur pertimbangan keadilan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan. Terdapat 4 aspek pembangunan sensitif gender yaitu : persoalan akses, partisipasi, kontrol, dan penerima manfaat suatu kebijakan /program. Untuk mengukur hal tersebut cara paling cepat adalah dengan melihat alokasi anggaran pemerintah setiap tahun yang dialokasikan, apakah adil, *accessible*, dapat dikontrol, dan dinikmati oleh kaum perempuan.

Gender budget merupakan rumusan prioritas kebijakan pemerintah dan legislatif yang paling solid dan kongkret (hingga

13 Laporan Sekwil Masruah yang dimuat dalam bulletin Semai, Tahun 2004

menyangkut alokasi sumber daya yang dihimpun, dikelola dan dibelanjakan). Penganggaran ini dimaksudkan untuk mengefektifkan berbagai kebijakan tentang pemberdayaan dan penanganan masalah-masalah gender secara integral dan komprehensif, dengan tidak menitikpkan persoalan pada sektor dan instansi tertentu saja. Gender budget tidak berarti anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, namun fokusnya adalah mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses dan penentuan kebijakan anggaran. Di banyak daerah penyumbang utama pajak dan retribusi daerah adalah kaum perempuan.

Salah satu hambatan yang paling nyata dalam perencanaan anggaran gender adalah belum adanya komitmen yang jelas dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan perempuan yang muncul akibat bias gender. Kuota 30% perempuan dalam legislatif pada pemilu 2004, yang diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan gender dalam anggaran, ternyata tidak memenuhi harapan. Capaian tertinggi adalah Kota Yogyakarta, di mana persentase anggota legislatif perempuan hanya mencapai 20%.

Dari keseluruhan capaian yang telah dikerjakan Koalisi Perempuan tingkat Wilayah Yogyakarta sekalipun berdasarkan standar nasional, sebenarnya dapat dikatakan Koalisi Perempuan telah berada pada "jalan yang benar" sebagai sebuah ormas yang bergerak pada level kebijakan publik, pendidikan politik dan advokasi masyarakat akar rumput. Keberhasilan yang telah dilakukan Koalisi Perempuan masih banyak kekurangannya. Beberapa kekurangan yang terjadi agaknya tidak pernah lepas dari kondisi internal Koalisi Perempuan maupun kondisi politik yang ada pada tingkat nasional maupun lokal.

Hambatan dan Intervensi Tindakan

Beberapa penghalang atas kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Yogyakarta dalam pendidikan politik:

1. Strukturasi Sistem Politik Patriarkhal dan Kapitalis

Masalah ketidakadilan gender adalah masalah politik, karena itu merupakan problem struktural. Berbicara keadilan gender harus dihubungkan dengan persoalan struktur politik yang berlangsung dalam sebuah negara atau masyarakat. Benar bila dikatakan telah ada perubahan-perubahan sekalipun bersifat tidak menyeluruh. Perubahan

minimal dapat disaksikan pada beberapa periode belakangan sejak ada UU Politik yang mengharuskan partai politik mengakomodir perempuan dalam partai dan pencalegan minimal 30 %. Ini pertanda yang baik untuk kemajuan politik perempuan. Namun dikemukakan, Ari Sujito,¹⁴ tindakan represi terhadap TKW dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan terus berlangsung. Diskriminasi terhadap perempuan dalam publik, dalam pemilihan dan mendapatkan pekerjaan, *mandegnya* implementasi kebijakan yang mendukung perempuan, eksploitasi perempuan dalam media terus berlangsung merupakan persoalan politik sistemik.¹⁵

Lebih jauh dikemukakan Ari Sujito, persoalan eksploitasi atas perempuan berlangsung terus menerus karena gelombang kapitalisasi dan korporasi yang semakin gencar menerjang Indonesia. Perempuan dengan segala penderitaan yang diperolehnya tetap harus berkelahi dengan sistem politik yang memang feodal, dan mendukung kapitalisasi industrial. Komodifikasi tubuh perempuan oleh industri-industri hiburan dan iklan adalah bentuk lain pelanggaran sistem politik patrimonial yang menjerumuskan perempuan. Proses semacam itu jelas merupakan bentuk penyiksaan sistemik kapitalisme atas perempuan dengan dalih pembebasan hak yang harus dipikul secara sistemik.¹⁶

2. Sistem Kultural dan Agama

Sistem politik patriarki pada akhirnya menjadi bagian dari pola hidup masyarakat yang tanpa disadari membentuk budaya patriarki. Karakteristik masyarakat patriarki merupakan karakteristik negara dan masyarakat yang mengedepankan kepentingan laki-laki ketimbang perempuan yang diadopsi dari nilai-nilai patriarki itu sendiri. Nilai patriarki awalnya dipergunakan oleh Max Weber ketika menjelaskan tentang sistem sosial yang berkembang di masyarakat yang dominan diperankan oleh laki-laki (ayah) dalam lingkup keluarga inti, keluarga luas dan lingkup yang lebih luas lagi yakni ekonomi.¹⁷

Dalam tradisi gerakan perempuan, dikenal istilah feminis yang dianggap memperjuangkan keadilan dalam masyarakat yang

14 Dosen Sosiologi FISIPOL UGM

15 Ari Sujito, 2008, Menegosiasikan Peran Perempuan dalam Era Demokrasi Semu, dalam Subhi Ridho (ed), *Menembus Batas Politik Perempuan Indonesia Mendobrak tabir Budaya, Sosial, dan Agama*, LSIP, hlm. 17-18.

16 *Ibid*, hlm.19.

17 Luh Ayu Saraswati, *Kekerasan Negara, Perempuan dan Refleksi Negara Patriarki*, yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta 2001, hlm. 40

didominasi perspektif patriarkhi dengan dukungan ideologi gender. Kaum feminis mengkritik ideologi patriarkhi yang berkembang dan dominan dalam lingkup amat luas dalam kehidupan masyarakat. Budaya patriarkhi merupakan kontrol laki-laki atas perempuan, atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya dan statusnya.¹⁸ Persoalan dominasi laki-laki atas perempuan dengan begitu merupakan persoalan yang tidak sederhana. Dominasi dan subordinasi telah merambah ke seluruh ranah kehidupan kaum perempuan.

3. Politik Representasi

Apakah Koalisi Perempuan merupakan model politik representasi yang disinggung Gayatri atukah yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia adalah masalah lain yang lebih besar dari sekedar politik representasi. Sebagai sebuah ormas gerakan, Koalisi Perempuan sebenarnya cukup memiliki persyaratan secara akademis. Namun di lapangan ternyata mengalami banyak persoalan teknis dan substansial sehingga gerakannya cenderung kurang sistematis dan sangat personal.

Persoalan siapa mewakili siapa menjadi hal yang cukup ramai dibahas dalam setiap gerakan sosial yang dilakukan. Ada kesan bahwa perempuan tertinggal, perempuan marginal, dan perempuan terindas dalam banyak masalah kehidupan “mempertaruhkan hidupnya” kepada pihak lain. Dalam kajian *sub altern* ada kaitan bahwa orang yang merasa mendapatkan mandat dari orang lain sebenarnya tidak berbeda dengan mewakili dirinya sendiri. Di sinilah persoalan politik representasi menjadi bagian tak terpisahkan.

Bermainnya politik representasi sebenarnya menempatkan masyarakat pada posisi yang tersandera, sekalipun tidak dirasakan, karena mereka yang terpinggirkan dan merasa mewakili memainkan peranannya masing-masing. Pada keduanya saling terjadi *simbiose mutualisme* secara tidak langsung, karena yang sebenarnya sadar mewakili kelompok marginal adalah kelas menengah atau para aktivis, sementara kelompok marginal banyak tidak peduli dengan apa yang selama ini mereka kerjakan. Ketidakpedulian ini yang oleh aktivis gerakan sosial ditangkap sebagai peluang untuk direpresentasikan dalam aktifitas gerakan sosial politik.

Dalam kasus Koalisi Perempuan wilayah Yogyakarta sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dalam kasus-kasus

18 Banawiratma, Perempuan, Agama dan Masa Depan Demokrasi, dalam Subkhi Ridho, *Perempuan, Agama dan Demokrasi*, LSIP, Yogyakarta 2007.

sosial politik kontemporer. Di mana sekelompok masyarakat merasa mewakili kelompok lain sekalipun kelompok yang diklaim diwakili sebenarnya tidak paham benar apa yang menjadi agenda politik gerakan perempuan. Kelompok marginal pedesaan misal, kelompok ibu-ibu bakul pasar, pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima, penjual *jajan* keliling sampai buruh tani harian, tidak pernah tahu apa yang menjadi agenda gerakan perempuan, termasuk yang menjadi agenda politik Koalisi Perempuan Indonesia. Tetapi secara agak berani aktivis Koalisi Perempuan mengklaim mewakili ibu-ibu marginal tersebut. Hadirnya politik representasi dengan begitu menjadi kendala dari gerakan Koalisi Perempuan Indonesia yang basis massanya di banyak tempat tidak jelas, dan tidak loyal seperti ormas keagamaan (baca: Muhammadiyah, NU, Persis).

4. Politik Ekonomi *Funding Agency*

Apa yang selama ini dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia ternyata masih banyak yang tergantung pada donor. Aktifitas Koalisi Perempuan yang jumlahnya demikian banyak, lebih banyak karena “telah mendapatkan tawaran donor” dan “mengikuti selera donor”, bukan karena persoalan yang menjadi masalah pokok di tingkat akar rumput atau masyarakat basis.

Koalisi Perempuan akhirnya cenderung lebih menyukai tema-tema seperti perwakilan politik perempuan dalam parlemen, keterlibatan perempuan dalam KPUD baik Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan dan Desa sebagai KPPS, mobilisasi massa untuk keterwakilan perempuan, dialog dengan caleg perempuan, atau kontrak politik antara caleg perempuan dengan masyarakat secara simbolik. Tema ini tentu saja berkaitan dengan sumber dana yang ada di beberapa donor dalam *desk democracy*.

Dalam kaitan dengan donor, Koalisi Perempuan tampaknya juga tidak bisa bekerja yang bersifat kontinyu tanpa adanya dana yang dikucurkan oleh *funding agency*. *Donor agency* dapat melanggengkan “kekuasaannya” karena memberikan suntikan dana pada para mitra. Tidak banyak CSO yang berani mengkritik *funding agency* karena adanya ketakutan tidak lagi mendapatkan kucuran dana dari *funding agency*.

Jika memperhatikan ketergantungan kerja Koalisi Perempuan wilayah Yogyakarta dengan donor maka sebagai embrio gerakan sosial, Koalisi Perempuan tidak akan menjadi sebuah gerakan sosial yang benar-benar mandiri dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk

melakukan “perlawanan” atas ketidakadilan yang selama ini dialami kaum perempuan. Koalisi Perempuan akan tetap dan terus menerus menjadi embrio gerakan sosial, tetapi tidak akan menjadi aktor yang sesungguhnya dalam mempengaruhi perubahan kebijakan dalam sebuah negara.

Penutup

Teori gerakan sosial menyebutkan bahwa dalam sebuah gerakan sosial, paling tidak harus ada 4 hal yakni aktor, isu, jaringan dan aktifitas yang dilakukan berkesinambungan. Kesemuanya ada di dalam Koalisi Perempuan. Donatella della Porta dan Mario Diani juga mensyaratkan adanya kesadaran kolektif dan tindakan kolektif untuk menyikapi persoalan yang menjadi problem sosial politik perempuan. Tampaknya kesadaran kolektif ini di Koalisi Perempuan diawali dari kesadaran perempuan kelas menengah terdidik di Jakarta dan kota-kota lain. Tindakan kolektif juga diawali dari kelas menengah yang mampu membuat statemen politik menggunakan landasan akademik. Kesadaran politik dan tindakan politik ini kemudian diderivikasikan kepada perempuan lain yang ada di daerah-daerah, termasuk di Yogyakarta.

Teori tersebut di lapangan mengalami benturan. Pertama soal aktor, bahwa gerakan sosial selalu memiliki aktor aktor yang bekerja di lini utama. Kelompok ini jumlahnya sedikit dan mereka dalam teori partisipasi politik sering disebut sebagai aktivis. Koalisi Perempuan juga demikian, munculnya aktor yang itu itu saja menjadi masalah ketika organisasi ini menyebut dirinya sebagai ormas gerakan. Ketergantungan pada aktor tertentu, misalnya sekwil atau sekcab, membuat organisasi ini akan berjalan manakala aktornya memiliki cukup energi untuk kerja maraton dan akan macet manakala ditinggalkan para aktor/pemimpinnya (2000-2009). Ini terbukti dengan tutupnya sekretariat Koalisi Perempuan secara sementara, sejak bulan Agustus 2009. Kantor baru akan buka manakala, ada rapat rapat darurat untuk menyikapi Konggres Luar Biasa atau Konggres Nasional yang akan dilakukan akhir tahun 2009 ini.

Berkaitan dengan Koalisi Perempuan dapat dikatakan bahwa KPI masih didominasi aktor. Ketika tidak ada aktor yang bergerak terus menerus, maka organisasinya *collaps*, tumbuh, namun tidak ada visi gerakan yang memuat *collective consciousness* dan *collective behaviour*. Cara kerja Koalisi Perempuan sebagian besar masih mendasarkan pada adanya selera donor (*funding agency*) sehingga masih belum mandiri

dalam bekerja.

Hal yang sangat memprihatinkan adalah *donor agency* tidak memperhatikan adanya isu-isu yang dianggap pinggiran padahal sangat krusial, misalnya soal penguatan nelayan, buruh perempuan, kaum *difable* dan pengelolaan hutan rakyat. *Donor agency* lebih tertarik pada isu-isu besar semacam *good governance*, demokratisasi dan kebijakan publik. Hal ini membuat gerakan Koalisi perempuan Indonesia masih lamban dan sulit menjadi gerakan sosial yang mapan. Persoalan lain yang menjadi penyebab lemahnya gerakan Koalisi perempuan Indonesia adalah lemahnya ikatan emosi relasi antara aktor dengan jamaah.

Daftar Bacaan

- Alda Britto da Motta dan Inaia Maria Moreira de Carvlho (1993), *Pemiskinan dan Partisipasi Perempuan dalam Gerakan Sosial di Brazil*, dalam *Kaum Perempuan dan Politik Strategi Ekonomi Internasional*, Jakarta: Kalyanamitra.
- Alimi, Moh. Yasir, dkk. (1999), *Advokasi Hak Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Seri Pendidikan Politik, Yogyakarta: LKiS.
- Anugrah, Astrid. (2009), *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam.
- Arbaningsih, Dri., (2005) *Kartini, Dari Sisi Lain_ Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi "Bangsa"*, Jakarta: Kompas.
- Budiman, Arif dan Olle Tornquist (2001), *Aktor Demokrasi, Catatan tentang Gerakan Perlawanan Di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- Costa, Mariarosa Dalla & Giovana F Dalla Costa, (2000), *Kaum Perempuan dan Politik Strategi Ekonomi Internasional*, Jakarta: Kalyanamitra.
- Culla, Adi Suryadi, (2006), *Rekonstruksi Civil Society di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- De Stuers, Cora Vreede, (2008), *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaiannya*, Depok: Komunitas Bambu.
- Faqih, Mansour, (1996°) *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, (1996b). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, (2002), *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Insist Press.
- Hayati, Elly Nur, Zuli Qodir, Imma Susilowati (ed). (2009), *Belajar dari Akar Rumput, Merajut Aksi Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Circle Indonesia.

- Ismail, Nurjannah (2003), *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki Laki dalam Penafsiran*, LKIS, Yogyakarta.
- Jordan, Lisa & Peter Van Tuijl. (2006), *Akuntabilitas LSM, Politik, Prinsip, dan Inovasi*, Jakarta : LP3ES.
- Klandermans, Bert and Suzanne Staggenberg, (eds.). (2002), *Methods of Social Movement Research*, England: Minnesota.
- Konggres Wanita Indonesia, (1978), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, PN Balai Pustaka.
- Larana, Enrique, Hank Johnston, Joseph Gusfield, (1994), *New Social Movement From Ideology and Identity*, USA: Temple University of Philadelphia.
- Lisa Hadiz, ed. (2004), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Pilihan artikel *Prisma*, Jakarta: LP3ES.
- Matsui, Yayori. (2002), *Perempuan Asia dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulia, Siti Musdah. (2005), *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia.
- PortaDonatella Della. (1999), *Social Movements An Introduction*, USA: Blackwell Publisher.
- Putra, Fadillah, dkk. (2006), *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, Malang: Averoes Press.
- Ridho, Subkhi & Budi Asyhari (ed.), (2008), *Menembus Batas Politik Perempuan Indonesia Mendobrak Tabir Budaya, Sosial, dan Agama*. Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Politik.
- Ridho, Subkhi (ed.). (2007), *Perempuan, Agama, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Politik.
- Ridjal Fauzie, dkk. (1993), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jogjakarta: PT. Tiara Wacana.
- Rozaki, Abdur dan Nurkhalik Ridwan (2007), *Buku Panduan Pemberdayaan Politik Perempuan Lintas Agama*, Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Politik.
- Sastriyani, Siti Hariti (ed.), (2009), *Gender and Politics*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada & Penerbit Tiara Wacana.
- _____, (2009), *Women in Public Sector*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada & Penerbit Tiara Wacana.
- Singh, Rajendra, (2002), *Social Movement Old and New Perspective*, India: Sage Publication.
- Soetjipto, Ani Widayani, (2005), *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas.
- Subono, Nur Iman dkk. (1999), *Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli*,

Yayasan Jurnal Perempuan Jakarta.

- Subono, Nur Iman. (2000), *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: YJP.
- Surbakti, Ramlan. (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Tarrow, Sydney, (1997), *Power in Movement, Social Movements, Collective Action and Politics*, USA: Cambredge Studies in Comparative Politics.
- Tim IP 4 Lappera.(2001), *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*, Yogyakarta: IP4 Lappera.
- Toer, Pramoedya Ananta. (2000), *Panggil Aku Kartini Saja*, (Bagian I & II), Jakarta: Hasta Mitra.
- Triwibowo,Darmawan.(2006), *Gerakan Sosial, Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*, Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.
- Uhlin,Anders. (1998), *Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Utami,Tari Siwi. (2001), *Perempuan Politik di Parlemen, Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*, Yogyakarta: Gama Media.
- Wegner,Sarah,(2008), *Feminisme Mengubah Masyarakat, Strategi Pembebasan Perempuan dalam Revolusi Bolivarian*, Jakarta: Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan dan Jaringan Nasional Perempuan Mahardika.
- Wieringa, Saskia Eleonora, (1999), *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra.

Jurnal

- Yayasan Jurnal Perempuan.1999. *Catatan Perjalanan suara Ibu Peduli* Jakarta: YJP.
- Jurnal Perempuan No 63.2009. *Catatan Perjuangan Politik Perempuan*, Jakarta: YJP.

Bulletin Semai :

- Semai* Edisi IV April 2003 : “Ingin Nasib Perempuan Berubah ? Pilihlah Wakil Rakyat Perempuan”, Jakarta: KPI.
- Semai* Edisi VI Juni 2003 :“Membangun Rasa Percaya Diri Perempuan Di Bidang Politik”, Jakarta: KPI
- Semai* Edisi VIII Agustus 2003 : “Pastikan Partai Pilihan Anda Menempatkan Perempuan Dalam Daftar Urutan Jadi.” Jakarta : KPI.

Semai Edisi IX September 2003: "Pendidikan Untuk Pemegang Hak Pilih Jakarta: KPI.

Semai Edisi X Oktober 2003 : Sudahkah Anggaran Disusun Secara Adil Bagi Laki Laki dan Perempuan ?

Semai Edisi XII Desember 2003 : Perempuan Antara Reformasi dan Represi, Refleksi Lima Tahun

Semai Edisi II Februari 2004: Revisi AD/ART 2003 dan Persiapan Kongres KPI 2004, Jakarta: KPI.

Semai Edisi VIII Agustus 2004: Mengembangkan Organisasi Yang Kuat, Jakarta: KPI.

Semai Edisi IX September 2004: Koalisi Perempuan Indonesia Organisasi Non partisan, Jakarta: KPI.

Semai Edisi IV April 2009 : Sistem Pemilu 2009 Memakan Banyak Korban

Buku Khusus terbitan Koalisi Perempuan:

Agenda Politik Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, Cetakan ke-3 Agustus 1998.

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga 2005 Koalisi Perempuan Indonesia.

Mengenal Lebih Dekat Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, 2005.

Jalan Menuju Kursi Politik "Panduan Singkat Meraih Posisi Strategis dan Jadwal Kerja KPU 2007-2009" Sisipan SEMAI Januari 2009.

Perempuan Maju Perempuan Menang, 2009.

Modul Pendidikan Kader Dasar , Pendidikan Kader Berjenjang Koalisi Perempuan Indonesia, (Tim penulis : Emmy Astuty, Rustiati, Saktya Rini Hastuti, Yunani), Nopember 2009.

Modul Pendidikan Kader Menengah, Pendidikan Kader Berjenjang Koalisi Perempuan Indonesia, (Tim penulis : Aflina Mustafainah, Ana Khomsanah, Ika Kartika Dewi), Nopember 2009.

Modul Pendidikan Kader Lanjut, Pendidikan Kader Berjenjang Koalisi Perempuan Indonesia, (Tim penulis : Masruchah, Nugraheni P, Titiek Kartika H), Nopember 2009.

Laporan Jaringan yang Telah Diterbitkan

Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Laporan hasil Konferensi yang diadakan di Jakarta, International IDEA, September 2002.